

MENGGAGAS NEGARA KESEJAHTERAAN

Oleh:

Ahmad Dahlan, Santosa 'Irfaan

Dosen STAIN Purwokerto

ABSTRAK

Model negara kesejahteraan ditunjukkan untuk mengatasi depresi besar pada 1940-an dan dapat menghilangkan eksese kapitalisme yang terkesan tidak positif karena kekhawatiran egaliter tentang perlindungan sosial.

Di era modern, model kebijakan negara kesejahteraan telah menjadi referensi global. Namun, beberapa negara di luar Eropa dan Amerika belum sepenuhnya penciptaan kekayaan yang signifikan.

Adapun kesejahteraan Islam menekankan negara pada peningkatan kualitas dan peningkatan kualitas spiritual kesejahteraan masyarakat, di samping negara kesejahteraan sosial sebagai konsep dasar kesejahteraan.

Kata kunci: kesejahteraan materi, kesejahteraan spiritual, kesejahteraan sosial.

ABSTRACT

Welfare state model is shown to overcome the great depression in the 1940s and can eliminate the excesses of capitalism which has impressed not be positive because of egalitarian concern about social protection.

In the modern era, the policy model of the welfare state has become a global reference. However, some countries outside of Europe and America are not yet fully significant wealth creation.

Islamic welfare state emphasis on quality improvement and quality improvement of spiritual well-being of the people, in addition to social welfare state as the basic concept of welfare.

Kata kunci: material welfare, spiritual welfare, social welfare.

PENDAHULUAN

Negara kesejahteraan merupakan model kebijakan negara yang mengarah kepada perlindungan sosial atau kesejahteraan public (*public welfare*) melalui berbagai program seperti kesehatan masyarakat (*public health*), kesejahteraan para pensiunan, kompensasi pengangguran, perumahan sederhana (*public housing*), dan lain sebagainya.

Pada awal sejarahnya, negara penganut model ini berbeda-beda dalam menerapkan kebijakan.

Model di Inggris bermula pada kebijakan kesehatan yang direkomendasikan oleh William Henry Beveridge sehingga berdiri British National Health Service, di Jerman yang terkenal dengan terminologi *wohlfahrstat* berbentuk kebijakan sistem asuransi sosial dengan tokoh Otto von Bismarck. Di Prancis, diawali dengan kebijakan program nasional yang disebut *solidarity and insertion* yaitu suatu tindakan umum dalam tanggung jawab yang saling menguntungkan dan saling membantu dalam kesusahan sehingga melahirkan “national solidarity”. Swedia sebagai negara kesejahteraan yang konon paling ideal, pada saat dikenalkan oleh Gunnar Myrdal kebijakannya ditekankan pada standar gizi dan *full employment*.¹

Dari hal di atas, kajian negara kesejahteraan menjadi menarik, karena ia lahir dan dipraktekkan justru dari negara-negara kapitalis, seperti Inggris dan

¹ Ahmad Dahlan, "Krisis Negara Kesejahteraan", *Opini, SKH Suara Merdeka*, 27 Mei 2008.

Francis, yang sarat dengan dominasi individualisme dan menomersatukan produksi.

LANDASAN TEORI

Negara kesejahteraan atau *welfare state* yaitu suatu negara yang memberikan tunjangan jaminan sosial (*social security benefits*) yang luas seperti pelayanan kesehatan negara, pensiun negara, tunjangan sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya.²

Dalam perspektif yang luas, negara kesejahteraan bisa berdimensi ekonomi dan politik.

Perspektif ekonomi, negara kesejahteraan yaitu sistem ekonomi yang dipraktekkan suatu pemerintahan tentang program-program kesejahteraan sosial (*social welfare*) seperti dalam pelayanan kesehatan (*health care*), pendidikan (*education*), tenaga kerja (*employment*), dan jaminan sosial (*social security*).³

Perspektif politik, negara kesejahteraan yaitu suatu negara yang mempromosikan kesejahteraan public (*public welfare*) sebagaimana perspektif ekonomi. Bedanya, realisasi dari program *welfare state* tersebut (hanya) digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan melawan oposisi.⁴

Dari dua perspektif di atas, mengindikasikan negara kesejahteraan merupakan suatu bentuk program kebijakan suatu negara dalam berbagai perlindungan sosial-publik. Namun jika kebijakan tersebut telah dipergunakan

² Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpal Rumapea dan Posman Halolo (Jakarta: Pustaka Erlangga, tt.), hlm. 691.

³ *Wikipedia, the free encyclopedia (on-line)*, sub bab artikel “welfare state”, *copyright* 2002, (http://www.en.wikipedia.org/wiki/welfare_state), diakses tanggal 18 Juni 2008.

⁴ *Ibid.*

oleh pemerintah untuk tujuan dalam kekuasaan, berarti negara kesejahteraan telah bergeser dari dimensi ekonomi menjadi dimensi politik kesejahteraan.

Alfred Marshall (1842-1924),⁵ mendefinisikan *welfare state* sebagai bagian dari masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis.⁶

Deborah Mitchell menjelaskan *welfare state* dapat dilihat dari beberapa aspek dan pendekatan, seperti kebijakan (*policy*), pendapatan (*inputs*), produksi (*production*), pelaksanaan distribusi (*operation*), dan hasil pelaksanaan kebijakan (*outcomes*).⁷

Paul Spicker,⁸ menjelaskan *welfare state* tidak hanya mencakup deskripsi cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), tetapi juga konsep normatif bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.⁹

⁵ Alfred Marshall, ekonom berkebangsaan Inggris dalam bukunya yang berjudul *Principles of Economics* (1890) telah menggambarkan hubungan matematis antara variabel-variabel ekonomi. Marshall mampu memperlihatkan bagaimana nilai ditentukan secara parsial oleh kepuasan marjinal (*marginal utility*) dari suatu barang dan bagaimana keinginan menurun dengan diperolehnya setiap unit tambahan dengan menggunakan kalkulus. Lihat George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 136-142, dan Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Collins*, hlm. 402-403.

⁶ George Soule, *Ibid.*

⁷ Deborah Mitchell, "Comparing Welfare States", (*on-line*), (<http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/wsate.htm>), diakses pada tanggal 18 Juni 2005.

⁸ Paul Spicker adalah Direktur the Center for Public Policy and Management, Skotlandia. Banyak menulis tentang kebijakan sosial, dan salah satu penelitiannya adalah Studi hubungan antara manfaat sistem pengiriman, santunan orang tua, masyarakat tidak normal (*psychiatric patients*), manajemen perumahan, dan strategi anti kemiskinan lokal. Beberapa Karyanya adalah *Stigma and Social Welfare*, (tj.: Croom Helm, 1984) dan *Principles of Social Welfare*, (London: Routledge, 1988). "Paul Spicker", (*on-line*), (<http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/paulspicker.htm>), diakses tanggal 11 April 2007.

⁹ Paul Spicker, *Social Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, 1995) sebagaimana dikutip Edie Suharto, "Negara Kesejahteraan Dan *Reinventing Depsos*", *Makalah*.

Dari pendapat di atas dapat diartikan kapitalisme dalam *frame* negara kesejahteraan yang menerapkan program kebijakan kesejahteraan sosial seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pada dasarnya secara normatif memang suatu keharusan tanggung jawab negara.

SEJARAH NEGARA KESEJAHTERAAN

Banyak pendapat dalam mengungkap sejarah dan latar belakang kelahiran negara kesejahteraan.

Dalam *International Tiscali Encyclopaedia* dijelaskan *welfare state* pertama kali dipopulerkan oleh Alfred Zimmern tahun 1930an untuk membedakan antara kebijakan demokratis dengan *war-state* di beberapa kawasan Eropa yang diktator. Bagian-bagian *welfare state* dibangun dari Jerman (1883), New Zeland (1898), Austria-Hungaria (akhir abad 19), Norwegia (1909), Swedia (1910), Italia dan Rusia (1911), serta Amerika Serikat (1935).¹⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, Sugeng Bahagijo menjelaskan program *welfare state* dicetuskan pertama kali oleh Uskup Agung York dari Inggris tahun 1940-an, sebagai antitesis atas program *warfare state* (negara perang) ala Nazi Hitler di Jerman. Negara kesejahteraan kemudian dikembangkan oleh Otto von Bismark (Jerman), Von Tappe (Austria), dan Napoleon III (Perancis).

Paska Perang Dunia II (1945-1950), *welfare state* merupakan kreasi dan produk demokrasi multipartai atau kebijakan (koalisi) partai politik yang

¹⁰*International Tiscali Encyclopaedia (on-line)*, "welfare state", (<http://www.tiscali.co.uk/reference/welfarestate>), diakses tanggal 27 Juni 2005.

memerintah untuk menciptakan warga negara dan angkatan kerja yang terdidik dan sehat serta untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.¹¹

Otto von Bismarck, menurut Anthony Gregory,¹² merupakan sang kreator administrasi penjaminan sosial (*the social security administration*). Gagasan Bismarck tersebut muncul justru pada saat Tiran Jerman mengatur rakyatnya sebagai suatu organisasi masyarakat kolektif (*collective social organism*).¹³

Dalam Judith Bessant dkk.,¹⁴ dijelaskan ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832)¹⁵ mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number*, kesejahteraan terbesar sebagai prioritas terbesar.

Bentham memberikan perbedaan antara *individual "hedonic calculation"* (*maximizing individual utility*) sebagai dasar dari teori positif dalam perilaku

¹¹Sugeng Bahagijo, "Mimpi Negara Kesejahteraan", *freelists (on-line)*, (<http://www.freelists.org/archives/ppi/05-2006/msg00102.html>), diakses tanggal 10 Juni 2006.

¹² Anthony Gregory asisten peneliti di Independent Institute berasal dari Berkeley, California.

¹³Anthony Gregory, "The Conservative Welfare State", copyright tahun 2004, (*on-line*), (<http://www.lewrockwell.com/gregory>), diakses tanggal 30 Juni 2005.

¹⁴Judith Bessant dkk., *Talking Policy: How Social Policy in Made* (Crows Nest: Allen and Unwin, 2006), seperti dikutip oleh Edie Suharto, "Negara Kesejahteraan Dan *Reinventing Depsos*", *Makalah* pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", di Wisma MM UGM, Yogyakarta. Selain membahas aspek akademis negara kesejahteraan, seminar juga mengupas gagasan ideologis-politis yang disampaikan Siswono Yudo Husodo dan Darmawan Triwibowo, serta Penerapan 'Negara Kesejahteraan' dalam Konteks Otonomi Daerah yang dipresentasikan oleh Bupati Solok dan Bantul., (<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos.pdf>), diakses tanggal 11 April 2007.

¹⁵Jeremy Bentham sering pula disebut sebagai The Founder of British "utilitarianism" dan "philosophical radicalism". Buku pertamanya berjudul *Commentaries on the Laws of England* (1776) menginspirasi perlawanan terhadap "rule of law" Blackstone's yang dianggap telah *out of date (ancient)*. Lihat pada "Jeremy Bentham", (*on-line*), (<http://cepa.newschoo.edu/het/profiles/bentham.htm>), diakses pada tanggal 11 April 2007.

individu, sedangkan *social calculation (maximizing aggregate utility)* sebagai teori normatif daripada organisasi sosial.¹⁶

Pernyataan tersebut diperjelas Edie Suharto, istilah '*utility*' untuk menjelaskan konsep kebahagiaan (kesejahteraan). Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang dikembangkan, *bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.* Aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan secara maksimal. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai *father of welfare states*.¹⁷

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1879-1963)¹⁸ dan T.H. Marshall (1893-1981).¹⁹

Beveridge terkenal dengan *Beveridge Report*, suatu laporannya pada November tahun 1942 mengenai Social Insurance and Allied Services (sistem asuransi sosial komprehensif) di Inggris untuk memerangi lima hal yang disebut '*the five giant evils*' yaitu *want* (kekurangan), *squalor* (kemeralatan), *ignorance* (kebodohan), *disease* (penyakit), dan *idleness* (kemalasan). Tahun 1948, rekomendasi Beveridge mulai diimplementasikan dengan nama British National Health Service.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Edie Suharto, "Negara Kesejahteraan dan *Reinventing Depsos*" (*on-line*).

¹⁸William Henry Beveridge seorang ahli ekonomi, administrator, dan *social reformer*. Sekilas biografi dan pemikirannya dapat dilihat pada *answers (on-line)*, "William Beveridge", (<http://www.answers.com/topic/william-beveridge>).

¹⁹Thomas Humphrey Marshall, sosiolog dari Inggris. Banyak menulis essay yang terkumpul dalam *Citizenship and Social Class* (1950). Dia menganalisis bahwa pembangunan kewarganegaraan (*citizenship*) dapat dibangun dari pembangunan masyarakat, politik, kemudian hak-hak sosial. " Thomas Humphrey Marshall", *Wikipedia, the free encyclopedia (on-line)*, (http://www.wikipedia.org/wiki/Thomas_Humphrey_Marshall), diakses tanggal 5 Maret 2008.

T. H. Marshall berargumen warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut sistem negara kesejahteraan. Hal ini dikarenakan ketidakadilan yang diakibatkan oleh ketidaksempurnaan pasar (kapitalis) dalam menyediakan pelayanan sosial.²⁰

John Maynard Keynes (1883-1946),²¹ berpendapat bahwa *welfare state* dibentuk untuk mencapai aspek *full employment*. Kemudian Keynes memberikan peranan pemerintah menjadi dominan dalam semua manajemen permintaan efektif melalui kebijakan fiskal, akan tetapi Keynes tidak menawarkan gagasan mengenai kriteria untuk mengalokasikan pengeluaran sektor publik sebagai prioritas yang harus dipenuhi.²² Menurut Lawrence R. Klein,²³ aspek ini

²⁰Edi Suharto, "Peta Negara dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara", (<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf>), diakses tanggal 11 April 2007.

²¹John Maynard Keynes, ahli Ekonomi Inggris dari Universitas Cambridge yang dinobatkan sebagai pelopor ekonomi modern. Keynes adalah murid kesayangan Marshall yang menawarkan suatu penjelasan tentang pengangguran (*unemployment*) massal dan saran-saran bagi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran pada bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936). Ia juga berpendapat bahwa penyebab suatu depresi adalah permintaan agregrat (*aggregate demand*) yang menurun karena tidak ada dorongan konsumsi, maka pemerintah berhak campur tangan untuk menambah penghasilan konsumen agar tercipta permintaan agregrat. Banyak gagasannya yang mengkritisi teori ekonomi klasik yang digagas oleh Adam Smith. Lihat George Soule, *Pemikiran*, hlm. 143-175, dan Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Collins*, hlm. 348-352.

²²Lawrence R. Klein, *The Keynesian Revolution*, (New York: Macmillan, 1954), Bab 7, hlm. 165-187, Edward S. Greenberg, *Serving the Few: Corporate Capitalism and Bias of Government Policy* (New York: John Wiley, 1974), hlm. 230-231 sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1421 H/2000 M). hlm. 64, atau lihat Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1412 H/1992 M), hlm. 54.

²³Lawrence R. Klein adalah penerima penghargaan Nobel dalam Ilmu Ekonomi pada tahun 1980, atas kreasinya dalam pengembangan model-model ekonometrik dan aplikasi untuk analisis tentang fluktuasi ekonomi dan kebijakan-kebijakan ekonomi. Lihat "Lawrence R. Klein," *almaz (on-line)*, (<http://almaz.com/nobel/economics/1980a.html>), diakses tanggal 5 Juli 2008.

merupakan bentuk penolakan Keynes terhadap Teori Adam Smith bahwa *full employment* dijamin secara otomatis (*invisible hand*).²⁴

NEGARA KESEJAHTERAAN KONTEKS MODERN

Menurut Amich Alhumami, debat tentang negara kesejahteraan terfokus pada dua konsep yaitu *economic development* dan *social welfare*.²⁵

Economic development merupakan pembangunan ekonomi berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Konsep ini merupakan jalan untuk menciptakan kekayaan, meningkatkan kualitas dan standar hidup.

Social welfare berhubungan dengan *altruisme* (sifat mementingkan kepentingan orang lain), hak-hak sosial, dan redistribusi asset yaitu suatu mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat miskin dan tertindas.

Redistribusi menurut Bertram Schulin merupakan instrumen penting dalam jaminan sosial. Redistribusi tidak semata-mata karena kondisi pasar, tetapi dapat diciptakan dari kesadaran pribadi untuk mendermakan sesuatu tanpa

²⁴M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 64 dikutip dari Lawrence R. Klein, *The Keynesian*, hlm. 90.

²⁵Dua konsep tersebut oleh James Midgley, Dosen University of California–Berkeley, dalam *Growth, Redistribution and Welfare: Toward Social Investment*, disebut dengan *antithetical notions*. Amich Alhumami, “Negara Kesejahteraan”, (*on-line*).

kompensasi. Redistribusi juga dapat dilegalisasi sebagai konsep etika sosial atau solidaritas.²⁶

Legalisasi dapat dilakukan dengan intervensi kebijakan yang tepat, merujuk pada *social welfare to work*, yaitu pembangunan sosial yang padat karya, memobilisasi modal sosial dan asset produktif, serta mengembangkan usaha kecil dan menengah yang kesemuanya akan meningkatkan pendapatan, berdampak pada peningkatan kualitas dan standar hidup, menstimulasi pertumbuhan.

Robert Heilbroner (1919-2005),²⁷ sebagaimana dikutip Edi Suharto, berpendapat program negara kesejahteraan merupakan ideologi, sistem dan strategi yang jitu untuk mengelabui dampak negatif kapitalism.²⁸ Dengan demikian negara kesejahteraan sebagaimana dikemukakan para ahli merupakan konsep untuk mengalihkan perhatian terhadap aspek-aspek negatif dari prinsip-prinsip kapitalisme dari negara-negara barat yang liberalis, individualis dan mengedepankan kekuatan produksi.

Program *welfare state* ternyata cukup berhasil menciptakan “persepsi positif”. Apalagi program kebijakan pada aspek perlindungan sosial (*social*

²⁶Bertram Schulin, "Solidarity and Subsidiarity", dalam Werner Lachmann dan Hans Jurgen Rosner, *Social Security in Social Market Economy*, (Konrad, Adeneauer, Stiftung: Arbeitsbereich Internationale Zusammenarbeit, 1995), hlm. 145.

²⁷Robert Heilbroner, ahli ekonomi dan sejarawan di bidang pemikiran ekonomi dari Amerika. Ia lulusan Harvard University (1940) dan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Adolf Lowe, ahli ekonomi terkenal dari German Historical School. Bukunya yang berjudul *Worldly Philosophers* (1953), yang berisi tentang sejarah hidup dan kontribusi para pemikir ekonomi termasyhur di dunia, terjual hampir 4 juta eksemplar, *best seller* nomor kedua untuk kategori bidang ekonomi dibawah buku *Economics* karya Paul Samuelson. Beberapa karya lain Heilbroner adalah *21st Century Capitalism* (1993), *The Crisis of Vision in Modern Economic Thought* (bersama William S. Milberg, 1995). *Wikipedia, the free encyclopedia (on-line)*, "Robert Heilbroner", (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Heilbroner), diakses tanggal 11 April 2007.

²⁸Eddie Suharto, "Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan" *Republika (on-line)*, Jumat, 03 Agustus 2001, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=38916&kat_id=15&kat_id1=), diakses tanggal 10 Juni 2006.

security) menjadi fenomenal kerana dijadikan rujukan oleh banyak negara dunia berkembang.

NEGARA KESEJAHTERAAN KONTEKS ISLAM

Negara kesejahteraan perspektif Islam yang dimaksud di sini yaitu suatu kerangka berpikir tentang program kebijakan kesejahteraan umat dan egalitarisme dalam suatu negara sesuai prinsip-prinsip Islam.

M. Umer Chapra berpendapat *Islamic welfare state* merupakan suatu program kebijakan yang saling terkait antara bidang ekonomi dengan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara Islam untuk tujuan menciptakan kesejahteraan umat.²⁹

Dari pendapat di atas kemudian memunculkan wacana berpikir bahwa kebijakan negara dalam program kesejahteraan sosial sebagaimana negara-negara Barat belum komprehensif, karena program kebijakannya lebih menekankan pada pertimbangan kesejahteraan material belum pada yang bersifat spiritual.

1. Prinsip-Prinsip Dasar

Komitmen kesejahteraan (*welfare commitment*) dalam Islam tercermin dari misi kenabian yang didefinisikan dalam al-Qur'an bahwa nabi diutus untuk menjadi rahmat (*merciful blessing*) bagi sekalian alam.³⁰ Kerahmatan tersebut,

²⁹M. Umer Chapra, "The Islamic Welfare State and Its Role in The Economy" dalam Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.), *Reading Public Finance in Islam*, (Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 1415 H/1995 M), hlm. 71.

³⁰Lihat QS. Al-Baqarah (2):107.

secara eskplisit banyak disebutkan dalam al-Qur'an dalam berbagai ragam seperti *hayyatan thayyibatan (fostering of good life)*,³¹ serta *falâh (welfare)*.³²

Nash al-Qur'an, Hadits, dan tulisan para sarjana muslim tentang fungsi-fungsi kesejahteraan (*welfare function*) dalam negara Islam bukan berarti untuk memberikan kesamaan program *Islamic welfare state* dengan program *welfare state* ala Barat. Akan tetapi, penegasan bahwa kegunaan kesejahteraan (*welfare*) dalam *Islamic State* sangat diutamakan dan ditekankan oleh Nabi.³³

Islam membedakan secara jelas dan khas, filosofis tentang kesejahteraan yang komprehensif dan konsisten dengan konsep *human nature*, yaitu seseorang diciptakan dari *matter* tetapi seseorang tidak akan bisa lepas sebagai bagian dari aturan *Divine Spirit* (spirit keTuhanan).³⁴

Matter dan *Divine Spirit* secara bersamaan tertanam pada tiap makhluk Allah Swt. yang diberi kebebasan oleh-Nya, tetapi harus selalu merespon nilai ke-Tuhan-an dalam setiap kegiatannya dengan merujuk kepada *divine guidance* berupa al-Qur'an, Hadits, dan sumber-sumber Islam lainnya.³⁵

Dasar-dasar kesejahteraan sosial dalam Islam setidaknya meliputi:

- a. Pengentasan kemiskinan (*eradicate poverty*) dan penciptaan *full employment* dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi,
- b. Stabilitas nilai uang riil,
- c. Penegakan hukum dan ketentraman,

³¹Lihat QS. An-Nahl (16) : 97.

³²Lihat QS. Al-Hajj (22): 77.

³³M. Umer Chapra, "The Islamic Welfare, hlm. 72.

³⁴ Lihat QS. Al-Hijr (15):28-29.

³⁵ M. Umer Chapra, "The Islamic Welfare State", hlm. 73.

- d. Penyediaan jaminan sosial dan keadilan ekonomi (*economic justice*),
- e. Jaminan sosial (*social security*) dan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan (*wealth*).
- f. Jalanan hubungan internasional dan jaminan pertahanan nasional (*national justice*).³⁶

Keenam hal tersebut kemudian dikembangkan oleh Monzer Kahf sebagai keterkaitan yang erat antara Islam dan negara kesejahteraan yaitu bahwa Islam sebagai rahmat (*mercy*) dan penekanan hidup yang baik (*good life*) menjadi sinonim dengan kesejahteraan (*welfare*).³⁷

2. Persediaan Sumberdaya

Dua prinsip fundamental dalam sumberdaya adalah:

- a. Sumber daya yang diberikan oleh Allah Swt. dialamatkan untuk setiap manusia dan tidak terbagi dalam grup atau kelas tertentu,
- b. Kesejahteraan manusia secara umum, minimal dalam bentuk usaha untuk penghapusan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan material dasar.³⁸

Islam telah menjelaskan suatu sistem ekonomi yang mewajibkan penggunaan sumberdaya yang diberikan oleh Allah Swt. untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia dan menyediakan suatu kondisi kehidupan layak. Sehingga segala yang ada dan dimiliki oleh setiap manusia

³⁶ *Ibid.*, hlm. 78. Agak mirip dengan pendapat ini, Khoir M. Jalaluddin yang mengklasifikasikan fungsi-fungsi ekonomi dalam pembangunan Islam ke dalam a. Pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, b. Keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, c. Keadilan sosio-ekonomi, dan d. Kondisi aktivitas ekonomi yang kondusif.

³⁷ Monzer Kahf dalam "Taxation Policy in an Islamic Economy", dalam Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.), *Reading*, hlm. 106.

³⁸ M. Umer Chapra, "The Islamic Welfare", hlm. 76.

merupakan amanah Allah Swt yang seyogyanya dapat menciptakan minimal dua hal yaitu kebaikan hidup manusia dan keadilan sosio-ekonomi.³⁹

Penyediaan segala bentuk kebutuhan oleh pemerintah tidak boleh dengan cara penyiataan (*confiscating*) sumberdaya yang dimiliki oleh individu atau kelompok, tanpa kejelasan hukum.⁴⁰

Islam memiliki basis sumberdaya fiskal yang tidak terdapat pada negara kesejahteraan ala Barat yaitu zakat, selain pendapatan dari sumberdaya alam, pajak, dan pinjaman (luar negeri atau swasta) sebagaimana negara-negara sekuler.

Monzer Kahf yang tidak mengeksplisitkan tentang *Islamic welfare state* sebagai suatu terminologi dalam kajian ekonomi Islam, akan tetapi Kahf menghubungkan suatu *negara Islam* dengan *welfare state*, yaitu 3 hal penting

- a. Bagaimana melakukan suatu kebijakan yang dapat menciptakan suatu kesejahteraan (*welfare*),
- b. Pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), serta
- c. Keseimbangan (*balance and equilibrium*).⁴¹

3. Kesejahteraan Spirtial

M. Abdul Mannan menekankan negara sejahtera adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia secara komprehensif. Adapun negara kesejahteraan

³⁹M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Lukman Hakim (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. xxxiii.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 87.

⁴¹Monzer Kahf, "Taxation Policy in an Islamic Economy" dalam Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah (ed.), *Reading in Public Finance in Islam*, hlm. 105-127. Artikel ini pertamakali dipublish dari Z. Ahmad dkk., (ed.), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (tt.: tnp., 1983), hlm. 130-161.

dalam bidang ekonomi hanya merupakan salah satu bagiannya, selain nilai moral dan spiritual dan nilai politik.⁴²

Peningkatan spiritual dalam seluruh kebijakan makro baik politik atau pun ekonomi sebagai suatu wujud peningkatan kesejahteraan (umat), juga sangat relevan dengan pendapat Abul Khair Mohd. Jalaluddin yang secara panjang lebar mengupas fungsi-fungsi negara dalam melakukan kebijakan sehingga tercipta pembangunan ekonomi secara Islam. Pada bab kedua dalam bukunya yang berjudul *The Role of Government in an Islamic Economy*, dalam pembahasan tentang kekhasan Islam sebagai suatu negara dalam penciptaan *welfare state*, salah satunya adalah program pembangunan peningkatan spiritual (*spiritual uplift*) dan material (*material development*) sebagai suatu kesinambungan dan kesatuan.⁴³

Demikian juga dengan pendapat Naqvi yang menulis bahwa *welfare state* seperti identik dengan salah satu tujuan dari sendi-sendi ekonomi Islam, yaitu karakteristik umum keduanya yang sangat *egaliter*. Doktrin *welfare state* yang berusaha memperjuangkan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, merupakan puncak perjuangan hak-hak politik kewarganegaraan.⁴⁴

Naqvi mengutip I. Gough dari bukunya *The Political Economy of Welfare State*, bahwa karakter doktrin *welfare state* pada dasarnya berasal dari prinsip sosialisme, yaitu “*dari setiap orang sesuai kemampuannya dan untuk setiap*

⁴²M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 358.

⁴³Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economy*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991).

⁴⁴Haedar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelakar, 2003), hlm. 115.

orang sesuai kebutuhannya”. Sehingga intervensi negara diperlukan untuk meregulasi dalam produksi, konsumsi, dan ekonomi pasar.⁴⁵

Sistem global-modern yang kapitalistik dan sangat memanjakan *ego*, di bagian yang lain kehidupan sosialisme telah memasung hak kemerdekaan individu, sehingga menurut an-Nabahan pemerintah wajib melakukan intervensi-intervensi dalam melakukan kebijakan untuk kesejahteraan umat.⁴⁶

Bahkan Islam telah menekankan yang lebih besar (*preponderant*) tentang nilai-nilai moral, sehingga negara tidak dapat dilepaskan dari etika bermasyarakat. *Islamic Welfare State* merupakan konsep kebijakan dalam menciptakan spirit moral-religius dan kesejahteraan umum secara komprehensif.

NEGARA KESEJAHTERAAN KONTEKS INDONESIA

Edi Suharto menjelaskan bahwa negara kesejahteraan yang dipraktekkan di Eropa dan AS sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah seperti orang miskin, penderita cacat fisik, serta penganggur agar terhindar dari gilasan mesin kapitalisme.⁴⁷

Rokhmin Dahuri,⁴⁸ berkeyakinan bahwa sampai sekarang tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu mewujudkan kesejahteraan material (*material*

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 115-116, atau lihat I. Gough, *The Political Economy of Welfare State* (London, Macmilan, 1979).

⁴⁶ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Muhadi Zainudin (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 86.

⁴⁷ Edi Suharto, “Globalisasi, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia”, *copyright* tahun 2004 (<http://www.policy.hu/suharto/makIndo10.html>), diakses tanggal 27 Juni 2005.

⁴⁸ Rokhmin Dahuri adalah Guru Besar FPIK IPB, mantan Anggota Kabinet Gotong Royong.

well-being) bagi seluruh rakyatnya. Karena paham kapitalisme, menganggap bahwa kesejahteraan hanya bersifat material yang meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan bagi setiap warga negara, penghapusan kemiskinan (*poverty alleviation*), tersedianya kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan kehidupan layak (*honest living*), dan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil di antara warga bangsa.

Bahkan negara-negara kapitalisme yang ekonominya cukup baik, sampai sekarang juga tidak mampu memberikan kesejahteraan material bagi seluruh warga bangsanya. Apalagi kesejahteraan spiritual berupa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup, masih jauh dari faham kapitalisme.

Kegagalan sistem kapitalis terasa semakin serius jika dilihat dari kondisi instabilitas ekonomi dan ketidakseimbangan makroekonomi dunia yang tercermin pada tingkat inflasi dan pengangguran yang tinggi, jumlah penduduk miskin dunia, kontradiksi penduduk kaya dan miskin, defisit neraca pembayaran (*balance of payment deficit*), dan sering berubahnya secara eratik (*volatility*) pasar mata uang, komoditas dan *stock*.

Sementara itu, sebagian besar negara-negara berkembang (miskin) terjerat dalam jebakan utang luar negeri. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk melakukan pembangunan di segala bidang, terpaksa digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang tersebut.⁴⁹

Pada kondisi model negara kesejahteraan yang dianggap telah membawa kesejahteraan di belahan Eropa Barat dan Amerika ternyata ada opini “negatif”

⁴⁹Rokhmin Dahuri, ”The Celestial Economy”, *dephakdanham (on-line)*, (http://www.ham.go.id/index_HAM.asp?menu=artikel&id=441), diakses tanggal 14 Juni 2006. Lihat juga SKH *Republika*, Kolom Politik, tanggal 25 Nopember 2004.

sebagaimana ditulis oleh Dr. Otto Count Lambsdorff dalam makalah dengan judul "Welfare State: Poverty Alleviation or Poverty Creation?" yang dipresentasikan pada tanggal 1 Februari 2006 di Park Hyatt Hotel, Johannesburg saat mengenang Alfred and Winifred Hoernlé pasangan suami isteri yang merupakan guru besar pada South African Institute Of Race Relations. Setidaknya ada dua poin menarik dari tulisannya terkait dengan realitas negara kesejahteraan pada saat ini.

Pertama, *the welfare state is seen as an instrument to realise either a 'just' or 'socially just' distribution of goods, or to reach supposedly valuable goals. The welfare state is misused to buy political support of various special interest groups. And it has created a huge bureaucracy, which has its own very strong interests. Among the needs which have to be satisfied by the welfare state, the needs of the poorest in many cases do not enjoy priority.*

Kedua, *poor people suffer hunger and are unable to fulfil their basic needs. In many cases they lose their human dignity.*

Kedua point tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan negara kesejahteraan yang semula untuk keadilan sosial terhadap distribusi barang-barang untuk mencapai tujuan-tujuan yang bernilai sosial telah dimanipulasi oleh kekuatan politik dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Juga, akibat kepentingan birokrasi yang terlalu tinggi telah menciptakan banyak kasus rakyat miskin tidak lagi menjadi prioritas dalam pembangunan kesejahteraan sebagaimana mestinya. Juga, model negara kesejahteraan telah menciptakan ketidaksadaran atau kemalasan rakyat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bahkan dari mereka banyak yang kehilangan nilai-nilai kemanusiaan.

Lambsdorff melukiskan dalam 15 tahun terakhir telah terjadi ratusan juta rakyat dalam kemiskinan akut di banyak negara di Afrika dan Asia selatan, dan lebih dari 1,1 milyar rakyat berpenghasilan kurang dari US \$ 1 dollar per-hari.

Fenomena di atas merupakan sedikit gambaran dari model negara kesejahteraan yang menjadi impian publik, ternyata jika dilihat dari sudut pandang global masih menemui hambatan. Model negara kesejahteraan terwujud hanya pada negara-negara sebagian Eropa tapi sulit diwujudkan pada negara-negara Asia dan Afrika. Dengan kata lain, model negara kesejahteraan sebagai subsistem kapitalisme hanya memperbaiki kondisi rakyat miskin di negara-negara industri, tapi tidak berperan dalam pengikisan kemiskinan global.

Indonesia dengan modal sumberdaya alam yang sangat melimpah yang konon sedang menuju pada model negara kesejahteraan telah berujung pada kondisi krisis multidimensi seperti sekarang. Prioritas pembangunan kesejahteraan yang diprogramkan oleh pemerintah belum tampak pada kebijakan mana yang diprioritaskan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Alokasi pengeluaran pada pendidikan (seperti BOS), asuransi kesehatan (Aseskin) atau BTL yang telah dilakukan oleh pemerintah bisa jadi akan mengarah kepada model negara kesejahteraan. Akan tetapi pada kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji-gaji para hakim dan pegawai keuangan atau fasilitas dan insentif para eksekutif-legislatif yang berlipat-lipat merupakan model kebijakan yang tidak dilakukan pada awal sejarah pendirian negara kesejahteraan sebagaimana di Eropa.

Perlu dicatat adalah Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama merupakan suatu pertanda bahwa membangun negara kesejahteraan di Indonesia harus berdimensi *spiritual well-being*.

Pembangunan *spiritual well-being* sebagai bagian dari regulasi negara kesejahteraan dapat dimulai dari yang nyata-nyata diamanatkan oleh UUD 45.

Sehingga sangat tepat, realisasi anggaran pendidikan yang 20% karena hal tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas spiritual, baru kemudian 'national solidarity', kesehatan dan lain-lain.

PENUTUP

Sulit dibayangkan masa depan kita semua, jika bunuh diri, kemiskinan, pengangguran, busung lapar, kriminalitas, korupsi, kemacetan kota, porno aksi-pornografi dan aksi-aksi sosial destruktif yang lain telah nyata-nyata menjadi fenomena sosial, sedangkan negara masih kurang perhatian dalam pembangunan *spiritual well-being* sebagai bagian dari cita-cita menuju negara kesejahteraan.***

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. dkk., (ed.), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, tt.: tnp., 1983.
- Bahagijo, Sugeng, "Mimpi Negara Kesejahteraan", *freelists (on-line)*, <http://www.freelists.org>
- Bessant, Judith, dkk., *Talking Policy: How Social Policy in Made Crows Nest*: Allen and Unwin, 2006.
- Chapra, M. Umar, *Islam and Economic Challenge*, Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1412 H/1992 M.
- _____, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Dahlan, Ahmad, "Krisis Negara Kesejahteraan", *Opini, SKH Suara Merdeka*, 27 Mei 2008.
- Dahuri, Rokhmin, "The Celestial Economy", *SKH Republika*, Kolom Politik, tanggal 25 Nopember 2004.
- George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Gough, I., *The Political Economy of Welfare State*, London, Macmillan, 1979.
- Greenberg, Edward S., *Serving the Few: Corporate Capitalism and Bias of Government Policy*, New York: John Wiley, 1974.
- Gregory, Anthony, "The Conservative Welfare State", copyright tahun 2004, <http://www.lewrockwell.com>.
- Gulaid, Mahamoud A. dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.), *Reading Public Finance in Islam*, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 1415 H/1995 M.
- Jalaluddin, Abul Khair Mohd. *The Role of Government in an Islamic Economy*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991.
- Klein, Lawrence R., *The Keynesian Revolution*, New York: Macmillan, 1954
- Lachmann, Werner dan Hans Jurgen Rosner, *Social Security in Social Market Economy*, Konrad, Adeneauer, Stiftung: Arbeitsbereich Internationale Zusammenarbeit, 1995.
- Mannan, M. Abdul, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mitchell, Deborah, "Comparing Welfare States", <http://www2.rgu.ac.uk>.
- Nabahan, M. Faruq an-, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Naqvi, Haedar, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelakar, 2003.
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpal Rumapea dan Posman Halolo, Jakarta: Pustaka Erlangga, tt.
- Spicker, Paul, *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice Hall, 1995.
- Suharto, Edi "Peta Negara dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara", <http://www.policy.hu>
- _____, "Globalisasi, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan", <http://www.policy.hu>
- _____, "*Welfare State* dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial", <http://www.policy.hu>.
- _____, "Negara Kesejahteraan Dan *Reinventing* Depsos", *Makalah* <http://www.policy.hu>
- _____, "Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan", SKH. *Republika*, Jumat, 03 Agustus 2001,